

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film dokumenter secara umum dipahami sebagai bentuk karya sinematik yang berupaya merekam, menafsirkan, dan mengonstruksi realitas sosial secara faktual, namun dengan pendekatan artistik. Nichols menegaskan bahwa dokumenter bukanlah sekadar “cermin kenyataan”, melainkan cara kreatif untuk mengorganisir realitas agar penonton memahami isu sosial, budaya, atau politik tertentu. Oleh karena itu, dokumenter memiliki posisi unik antara fakta dan interpretasi, antara realitas dan konstruksi ideologis. (Nichols 2010:12)

Film dokumenter sebagai *“the creative treatment of actuality using storytelling tools to make reality meaningful.”* Artinya, film dokumenter tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga menggunakan unsur naratif seperti konflik, karakter, dan alur cerita untuk membuat kenyataan lebih mudah dipahami dan emosional bagi penonton. Bernard menekankan bahwa kekuatan dokumenter terletak pada kemampuan naratifnya untuk membangun empati dan kesadaran sosial, sehingga film dapat menjadi alat komunikasi dan edukasi yang kuat. (Bernard 2011:4)

Dalam konteks sosial, film dokumenter berfungsi sebagai media kritik dan refleksi terhadap realitas masyarakat, karena menghadirkan perspektif yang jarang disorot oleh media arus utama. Dokumenter sering digunakan sebagai alat perlawanan simbolik, terutama ketika menggambarkan isu-isu ketidakadilan,

penindasan, dan perjuangan rakyat. Melalui gabungan antara fakta lapangan, wawancara, dan narasi visual, dokumenter berperan membangkitkan kesadaran publik serta mendorong perubahan sosial dan politik.(Nichols 2017:1-3)

Terkait dengan film Ketika Rakyat Melawan, dokumenter ini merepresentasikan realitas perjuangan rakyat dan buruh Indonesia dalam menghadapi kekerasan struktural negara dan korporasi. Film ini tidak hanya menampilkan peristiwa demonstrasi dan benturan fisik, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan sistemik, eksploitasi ekonomi, serta penyempitan ruang demokrasi. Dengan demikian, film dokumenter dalam konteks ini tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana informasi atau hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi kritis dan media perlawanan sosial.(Sobur 2019:127-134)

Melalui film seperti Ketika Rakyat Melawan, dokumenter menjadi bentuk ruang publik, tempat rakyat menyampaikan aspirasi yang sering kali diabaikan oleh media dominan. Film ini mengajak penonton untuk memahami realitas buruh bukan sebagai data publik semata, melainkan sebagai subjek perjuangan manusia yang berhadapan langsung dengan publik kekuasaan. Dengan demikian, publik berperan penting dalam membangun kesadaran sosial, menggugah empati, serta menumbuhkan semangat kritis terhadap ketidakadilan publik yang masih terjadi di Indonesia.(Habermas 2023:78-84)

Dalam satu dekade terakhir, isu ketenagakerjaan di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, yang sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini diklaim pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun di sisi lain menimbulkan kontroversi besar di kalangan buruh, akademisi, dan pegiat hak asasi manusia.

Kalangan buruh menilai bahwa undang-undang tersebut lebih berpihak pada kepentingan modal dan korporasi besar, daripada melindungi kesejahteraan pekerja. Beberapa pasal dinilai mengikis hak-hak fundamental buruh, seperti kepastian status kerja, perlindungan upah minimum, jaminan pesangon, serta kebebasan berserikat. Selain itu, perluasan praktik outsourcing dan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam undang-undang ini dianggap menurunkan derajat buruh menjadi sekadar “alat produksi” yang bisa diganti kapan saja tanpa jaminan sosial yang memadai.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, berbagai gelombang protes dan aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Ribuan buruh turun ke jalan menuntut pencabutan pasal-pasal yang dianggap merugikan mereka. Aksi-aksi tersebut tidak hanya menuntut perubahan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan struktural yang semakin nyata dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, perjuangan buruh tidak lagi sekadar persoalan upah, tetapi juga perjuangan eksistensial untuk memperoleh martabat dan pengakuan sosial sebagai manusia yang setara dalam sistem produksi nasional. (Mc Quail & Deuze 2020:15-118)

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 77.965 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 63.806 pekerja yang di-PHK pada tahun 2023. Sementara itu, pada periode Januari hingga Agustus 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 44.433 orang, yang menandakan bahwa angka tersebut berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun. Data ini memperlihatkan bahwa sektor ketenagakerjaan nasional masih berada dalam kondisi rentan dan tidak stabil, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global, digitalisasi industri, serta kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.

Meningkatnya PHK ini juga tidak dapat dilepaskan dari dampak otomatisasi industri dan efisiensi perusahaan yang terjadi pascapandemi, di mana banyak perusahaan berupaya menekan biaya operasional dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dan outsourcing membuat posisi buruh semakin rentan terhadap pengurangan tenaga kerja secara sepihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pekerja berada dalam posisi yang tidak memiliki daya tawar kuat, sehingga menjadi korban dari sistem ekonomi yang menempatkan efisiensi dan profit di atas kesejahteraan manusia.

Selain itu, meningkatnya angka PHK juga dapat dibaca sebagai bentuk kekerasan struktural ekonomi, di mana kebijakan dan sistem ketenagakerjaan yang berlaku secara tidak langsung menimbulkan penderitaan bagi kelompok buruh. Mereka kehilangan mata pencaharian, mengalami ketidakpastian pendapatan, dan

sering kali tidak memperoleh hak-hak pasca kerja seperti pesangon, jaminan sosial, atau pelatihan ulang.(Galtung 2018:34-37)

Situasi tersebut menegaskan bahwa krisis ketenagakerjaan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Ketika negara gagal menciptakan ruang publik yang memungkinkan buruh untuk menyampaikan aspirasi dan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, maka yang terjadi adalah bentuk dominasi sistem terhadap dunia kehidupan rakyat pekerja. Dengan demikian, data peningkatan PHK dari tahun ke tahun bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan indikator nyata dari ketimpangan struktural dan rapuhnya perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Fenomena ini pula yang diangkat dalam film dokumenter Ketika Rakyat Melawan, yang secara visual merekam penderitaan, kemarahan, dan perlawanan buruh terhadap sistem yang menindas mereka.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa upah rata-rata buruh nasional pada Februari 2025 hanya mencapai Rp3,09 juta per bulan, dengan kenaikan tahunan sebesar 1,78%, angka yang jauh tertinggal dari tingkat inflasi nasional sebesar 3,2%. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa daya beli buruh justru menurun, meskipun secara nominal terjadi kenaikan upah. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya anomali ekonomi, di mana produktivitas dan beban kerja buruh terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang sepadan.

Kondisi ini menjadi lebih nyata ketika melihat data di wilayah industri padat karya seperti Bekasi dan Karawang, dua daerah yang menjadi pusat manufaktur nasional. Berdasarkan keputusan pemerintah daerah Jawa Barat, Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 ditetapkan masing-masing sebesar Rp5,59 juta di Karawang dan Rp5,69 juta di Bekasi. Namun, menurut hasil survei lapangan berbagai serikat buruh, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kedua wilayah tersebut telah mencapai kisaran Rp6 juta hingga Rp6,5 juta per bulan. Artinya, bahkan buruh yang menerima upah minimum pun masih mengalami defisit ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Kesenjangan antara pendapatan dan biaya hidup tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia masih belum berpihak pada kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah yang bersifat administratif tidak sejalan dengan realitas ekonomi di lapangan. Banyak perusahaan yang menolak penyesuaian upah dengan alasan menjaga daya saing investasi, sementara pemerintah sering kali bersikap kompromistis terhadap kepentingan modal. Dalam konteks ini, buruh bukan sebagai subjek manusia yang memiliki hak hidup layak. Inilah yang disebut sebagai bentuk kekerasan struktural ekonomi, yaitu situasi di mana kebijakan ekonomi dan struktur produksi menindas secara sistematis kelompok pekerja tanpa harus melalui kekerasan fisik. (Suwandi 2018:112-115)

Film dokumenter seperti *Ketika Rakyat Melawan* tidak sekadar memotret peristiwa sosial, melainkan menjadi cermin realitas ekonomi yang menindas. Melalui visualisasi perjuangan buruh di jalanan, orasi massa, dan simbol-simbol perlawanan rakyat, film tersebut mengungkapkan bagaimana sistem kapitalisme industri menciptakan ketidakadilan yang terlembaga. Dengan demikian, data ketimpangan upah yang dilaporkan oleh BPS dan realitas ekonomi di kawasan industri tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga menjadi isu kemanusiaan dan moral, yang menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi adalah bentuk kekerasan struktural yang harus disadari dan dilawan secara kolektif. (Fuchs 2021:92-97)



Gambar 1. 1 Berdemo di depan Gedung DPR

Tabel 1. 1 Buruh yang memegang spanduk

Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban anggota DPR, dengan menekankan bahwa sumber kekuasaan dan pembiayaan lembaga tersebut berasal dari rakyat. Ungkapan demos kratos memperkuat gagasan bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada

di tangan rakyat. Oleh karena itu, lembaga perwakilan semestinya menjalankan fungsi dan kewenangannya demi kepentingan masyarakat luas. Jika dikaitkan dengan situasi pada foto, pernyataan ini mencerminkan kesadaran politik para demonstran yang memanfaatkan ruang publik untuk menyuarakan kritik serta menegaskan kembali prinsip dasar demokrasi bahwa pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.



Gambar 1. 2 Kekesalan Rakyat

Tabel 1. 2 Ungkapan kekesalan Rakyat

Pernyataan tersebut menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada pejabat daripada kepada masyarakat. Terdapat pertanyaan kritis mengenai manfaat kebijakan apabila rakyat tidak merasakan peningkatan kesejahteraan maupun kebahagiaan, sementara justru pejabat yang memperoleh kenaikan gaji. Ungkapan ini menegaskan adanya persepsi ketimpangan prioritas dalam pengelolaan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan konteks foto, pernyataan tersebut merepresentasikan suara warga yang mengekspresikan kekecewaan dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat untuk menyejahterakan rakyat.

Kekerasan terhadap buruh tidak selalu hadir dalam bentuk fisik seperti pemukulan, intimidasi, atau represi aparat, tetapi justru lebih sering muncul dalam bentuk kekerasan struktural, yakni bentuk penindasan yang bekerja secara halus dan sistematis melalui kebijakan, hukum, serta relasi ekonomi dan sosial yang timpang. Dalam konteks ini, buruh menjadi korban dari sistem yang menciptakan ketidakadilan tanpa harus melakukan kekerasan secara langsung. Mereka terperangkap dalam struktur sosial yang membatasi akses terhadap kesejahteraan, pendidikan, jaminan kesehatan, dan rasa aman di tempat kerja. (Galtung 2018:34-37)

Kekerasan struktural terjadi ketika struktur sosial dan institusional menyebabkan individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Galtung menegaskan bahwa bentuk kekerasan ini tidak tampak secara langsung, tetapi terwujud dalam ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan ketidakadilan sistemik. Ia menyebut bahwa kekerasan struktural merupakan “built-in inequality that harms people by preventing them from achieving their full potential.” (Galtung 2010:32)

Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung melalui tindakan fisik atau kekerasan individu, tetapi muncul dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat mengalami ketidakadilan, penindasan, atau penderitaan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kekerasan struktural mencakup segala bentuk kondisi sosial yang menghambat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia pangan, Kesehatan

Pendidikan dan harga diri. Kekerasan ini bersifat “*invisible yet pervasive*” karena tertanam dalam public sosial, ekonomi, dan politik yang dianggap normal. (Winter dan Leighton 2020:14)

Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang terlihat secara nyata dan dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Kekerasan ini mengakibatkan luka fisik, kematian, atau penderitaan psikologis secara langsung.

Kekerasan budaya adalah bentuk kekerasan yang berasal dari nilai, norma, simbol, ideologi, atau keyakinan budaya yang digunakan untuk melegitimasi atau membenarkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Dari ketiga bentuk tersebut, perbedaan utama terletak pada cara kekuasaan bekerja dan dampaknya terhadap masyarakat. Kekerasan langsung bersifat kasat mata dan personal, kekerasan struktural bersifat sistemik dan melembaga, sedangkan kekerasan budaya bersifat simbolik dan ideologis. Meskipun berbeda, ketiganya saling berkaitan dalam satu lingkaran sosial: kekerasan budaya membenarkan kekerasan struktural, yang kemudian melahirkan kekerasan langsung. Dalam konteks film dokumenter Watchdoc: Ketika Rakyat Melawan, ketiga bentuk kekerasan ini tampak jelas rakyat kecil tertindas oleh kebijakan negara yang tidak adil (struktural), menghadapi tekanan aparat ketika melakukan protes (langsung), dan dicitrakan negatif oleh media atau ideologi kekuasaan (budaya).

Akibat dari kolonisasi tersebut, buruh kehilangan ruang untuk bersuara dan menjadi subjek yang tidak diakui dalam sistem komunikasi publik. Ketika mereka mencoba menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, aksi mogok, atau orasi,

suara mereka sering kali dipersepsikan sebagai gangguan terhadap stabilitas ekonomi, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi deliberatif. Inilah bentuk kekerasan simbolik dan ideologis yang mengiringi kekerasan struktural, di mana ketimpangan kekuasaan direproduksi melalui media, hukum, dan kebijakan publik.(Bourdieu & Passeron 2019:31-35)

Kekerasan terhadap buruh tidak lagi bersifat langsung dan fisik, tetapi telah berubah menjadi mekanisme penindasan yang melembaga dan tersamarkan di balik struktur ekonomi-politik. Buruh bukan hanya menghadapi tekanan dari perusahaan, tetapi juga dari sistem negara yang menormalisasi ketimpangan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya gerakan sosial dan film dokumenter kritis seperti Ketika Rakyat Melawan, yang berfungsi untuk membongkar kekerasan struktural tersebut dan mengembalikan ruang komunikasi yang adil bagi rakyat pekerja.

Gambaran dari sebuah film dokumenter Ketika Rakyat Melawan yang diproduksi oleh kanal YouTube Watch Documentary. Film ini menjadi salah satu representasi paling autentik dari perjuangan rakyat dan buruh Indonesia dalam menghadapi tekanan struktural dari negara dan korporasi. Melalui pendekatan sinematik yang realis, film ini menampilkan potret nyata ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta perlawanan kolektif terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gaya dokumenter yang digunakan menghadirkan kesan kedekatan emosional antara penonton dan subjek yang ditampilkan, sehingga penonton tidak sekadar menyaksikan peristiwa, tetapi

juga turut merasakan emosi, penderitaan, dan semangat perjuangan para buruh di lapangan.

Film ini tidak hanya menyoroti bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti bentrokan antara aparat dan demonstran, gas air mata, serta penangkapan aktivis, tetapi juga mengungkap kekerasan sistemik dan simbolik yang jauh lebih mendalam. Misalnya, adegan-adegan yang memperlihatkan buruh hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, tuntutan terhadap upah layak yang diabaikan, hingga pembatasan ruang berekspresi oleh aparat negara. Semua elemen tersebut memperlihatkan bagaimana sistem hukum dan ekonomi bekerja secara terstruktur untuk mempertahankan status quo, sehingga buruh terperangkap dalam siklus ketidakadilan yang berulang. (Nichols 2017:108-112)

Fenomena tersebut tampak nyata dalam realitas buruh Indonesia yang dihadapkan pada kebijakan ekonomi yang sering kali tidak partisipatif dan menindas. Suara buruh yang berusaha menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi atau negosiasi sering kali dianggap ancaman terhadap stabilitas ekonomi. (Galtung 2018:34-37)

Dengan demikian, topik ini menjadi penting untuk dikaji karena merepresentasikan fenomena aktual pasca-Omnibus Law, meningkatnya angka PHK dan stagnasi upah, serta munculnya film independen sebagai ruang komunikasi alternatif rakyat. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam ranah ilmu komunikasi dan kajian media, tetapi juga menjadi

refleksi kritis atas kondisi sosial-ekonomi buruh Indonesia di tengah sistem kapitalisme yang menindas.(Bungin 2017:98-105)

1.2 Permasalahan Penelitian

Meskipun film dokumenter *Ketika Rakyat Melawan* merekam aksi demonstrasi buruh dan perlawanan rakyat terhadap kebijakan negara, kajian akademik yang secara khusus membahas film ini sebagai ruang publik alternatif dan sebagai pembentuk wacana perlawanan rakyat masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan demonstrasi sebagai peristiwa sosial atau konflik politik, tanpa mengkaji bagaimana film dokumenter membangun makna perlawanan melalui unsur bahasa, visual, simbol, dan narasi yang digunakan.

Film dokumenter *Watchdoc Ketika Rakyat Melawan* hadir sebagai media alternatif yang berpotensi membuka ruang publik tandingan bagi rakyat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap ketidakadilan struktural. Namun, belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana ruang publik tersebut direpresentasikan dan bagaimana wacana perlawanan rakyat dikonstruksi dalam film. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada representasi ruang publik dan wacana perlawanan rakyat dalam film dokumenter *Watchdoc Ketika Rakyat Melawan* dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan dalam pertanyaan penelitiannya yaitu “Bagaimana Ruang publik dan wacana perlawanan rakyat dalam film dokumenter Watch doc “Ketika Rakyat Melawan”.

1.4 Tujuan Penelitian

Teori ruang publik alternatif berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami film dokumenter sebagai sarana komunikasi politik dan sosial bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menempatkan film dokumenter Watchdoc Ketika Rakyat Melawan sebagai ruang diskursif tandingan yang memungkinkan buruh dan rakyat kecil mengartikulasikan aspirasi, kritik, serta bentuk perlawanan terhadap kebijakan negara dan ketimpangan struktur ekonomi.

Keterkaitan teori ruang publik alternatif dengan tujuan penelitian terletak pada upaya untuk mengkaji bagaimana ruang tersebut direpresentasikan serta bagaimana wacana perlawanan rakyat dibentuk dalam film dokumenter. Dengan menjadikan Ketika Rakyat Melawan sebagai objek penelitian, kajian ini bertujuan menelusuri bagaimana representasi visual, penggunaan bahasa, simbol, dan narasi berfungsi dalam membangun ruang publik alternatif. Analisis dilakukan tidak hanya dengan memandang film sebagai produk kultural, tetapi sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan konteks meningkatnya pemutusan hubungan kerja, stagnasi upah, kekerasan struktural, dan penyempitan ruang demokrasi pasca kebijakan Omnibus Law.

Melalui integrasi teori ruang publik alternatif dan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan praktik sosial yang melandasi representasi perlawanan rakyat dalam film dokumenter tersebut. Dengan demikian, teori ruang publik alternatif berperan tidak sekadar sebagai konsep teoretis, melainkan sebagai perangkat analitis utama dalam mencapai tujuan penelitian, yakni memahami fungsi film dokumenter sebagai ruang komunikasi alternatif bagi rakyat dalam menghadapi dominasi negara dan kepentingan modal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat film, aktivis sosial, dan masyarakat dalam memahami peran strategis media dokumenter sebagai alat komunikasi emansipatoris. Film dokumenter seperti *Watchdoc: Ketika Rakyat Melawan* dapat menjadi contoh nyata bagaimana media digunakan untuk mendorong partisipasi publik, membangun solidaritas sosial, dan memperjuangkan keadilan melalui representasi suara rakyat kecil. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi lembaga media dan pemerintah agar lebih terbuka terhadap wacana publik yang kritis serta menghargai keberagaman suara di ruang demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat dimensi akademik ilmu komunikasi, tetapi juga memiliki relevansi sosial dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang publik yang bebas, egaliter, dan berpihak pada kebenaran sosial.

1.5.2 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam ranah analisis wacana kritis dan studi media dokumenter. Melalui penerapan teori ruang publik Jürgen Habermas dan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang bagaimana media dalam hal ini film dokumenter berperan sebagai ruang komunikasi alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik sosial dan politik. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara media, kekuasaan, dan ideologi, serta memberikan perspektif baru bahwa film dokumenter tidak hanya menjadi sarana penyampaian fakta, tetapi juga alat pembentuk wacana dan kesadaran kritis publik terhadap realitas sosial.